

**PENGARUH MORALITAS DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN
(Studi empiris pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman)**

*Untuk Sebagai Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi
Skripsi*



Oleh:

Prima Khairan

2007/ 88923

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2012

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PENGARUH MORALITAS DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman)**

Nama : PRIMA KHAIRAN
NIM/BP : 88923 / 2007
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2012

Disetujui Oleh:

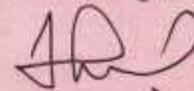
Pembimbing 1



Dr. H. Efrizal Syofvan, SE, M.Si, Ak

NIP.19580519 199001 1 001

Pembimbing 2



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak

NIP. 19771123 200312 2 003

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc

NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Moralitas Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap
Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten
Padang Pariaman)

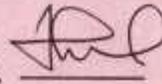
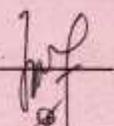
Nama : Prima Khairan

BP/NIM : 2007/88923

Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	2. 
3. Anggota	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota	: Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	4. 

ABSTRAK

Prima Khairan (2007/88923) Pengaruh Moralitas dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Tingkat Kecurangan Laporan Keuangan (Studi empiris pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman)

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofian SE M.Si Ak

Pembimbing II : Hendri agustin SE M.Sc Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh moralitas aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. 2) Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Padang Pariaman. Pengambilan sampel secara *total sampling*, dengan responden kepala dan staf akuntansi SKPD. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS).

Kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) Moralitas berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan, dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2.037 < 2,058$ (sig 0.046 $< \alpha$ 0,05) yang berarti H_1 diterima. 2) Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan, dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2.299 < 2,2075$ (sig 0,025 $< \alpha$ 0,05) yang berarti H_2 diterima.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi seluruh instansi pemerintah agar moral/kepribadian yang bagus dapat di terapkan pada instansinya maka pedoman dalam berperilaku sesuai dengan peraturan harus ditegakkan sehingga untuk melakukan kecurangan dalam instansi tersebut bisa dicegah, aset milik pemerintah ditertibkan lagi penggunaannya agar motivasi negatif/dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan dapat dicegah, dengan menerapkan tingkat kompetensi dan menciptakan kepemimpinan yang kondusif serta pengawasan yang terus menerus dan periodik dalam menilai kualitas pengendalian intern maka kecurangan juga dapat dicegah. Pada intinya untuk mencegah kecurangan tidak terjadi di instansi pemerintah sebaiknya dimulai sejak menerima seseorang (*recruitment process*) sebagai pegawai yang dilakukan melalui seleksi yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 2) Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah variabel penelitian seperti kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi dan variabel-variabel lainnya yang mungkin berpengaruh kuat dengan kecurangan dalam laporan keuangan serta mengurangi pernyataan negatif karena responden kurang bisa menjawab dengan tepat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Moralitas dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Tingkat Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah (studi empiris pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman)**". Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Bapak/Ibu kepala bagian akuntansi / keuangan di SKPD kabupaten Padang Pariaman yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

5. Ayah dan Ibu (Hanurawan SE,MM dan Umul Khair Amd) , adik-adik (Ziadatil Khairan, Imam Khairan, Adam Khairan), yang tersayang (Nova Lisa Spd), beserta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a, perhatian, dan kasih sayang serta pengorbanan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II. KAJIAN TEORI	13
A. Kajian Teori	13
1. Definisi Kecurangan	13
a. Jenis-Jenis Kecurangan	15
b. Faktor-Kaktor Kecurangan	18
c. Kecurangan dalam Laporan Keuangan	23
2. Moralitas	25
3. Sistem Pengendalian Intern	28
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Hubungan Antar Variabel Penelitian	38
D. Rerangka Konseptual	41

E. Hipotesis	42
BAB III. METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel	43
C. Jenis Data dan Sumber Data	45
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Variabel Penelitian	46
F. Instrumen Penelitian	46
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	49
H. Hasil Uji Coba Instrumen.....	51
I. Uji Asumsi Klasik	55
J. Teknik Analisis Data	57
K. Definisi Operasional	62
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Sampel dan Responden Penelitian	64
B. Demografi Responden	65
C. Deskripsi Variabel Penelitian.....	68
D. Statistik deskriptif	75
E. Uji Validitas dan Reliabilitas	76
F. Uji Asumsi Klasik	77
G. Hasil Penelitian	81
H. Pembahasan	86

BAB V. PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Keterbatasan	92
C. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan dalam dunia pemerintah yang dilandasi oleh nuansa politik telah mempengaruhi pimpinan pemerintah melakukan kecurangan (*froud*). Banyak pemicu seseorang untuk melakukan kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Kecurangan dapat kita lihat dari penyajian laporan keuangan. Jika laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan fakta dan bersifat material yang diketahui tidak benar dan dilakukan secara sengaja dengan maksud menipu maka dapat dikatakan sebagai kecurangan.

Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan serta menghindari terjadinya perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah daerah sebagai penyaji laporan keuangan dengan pengguna laporan keuangan. Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah harus disajikan secara relevan dan reliabel serta perlu pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Kecurangan pada dasarnya merupakan upaya yang disengaja untuk menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Arens (2008:430), yang menyatakan bahwa kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam kaitannya dengan konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja.

Menurut Marwick (1993) dalam Aviora (2008) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan pelaporan keuangan antara lain: a) Keefektifan pengendalian intern, b) Motivasi, c) moralitas, d) Kesesuaian Kompensasi.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang cukup dan efektif dapat memperkecil celah para pelaku kecurangan untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan menguntungkan mereka sendiri. Semakin efektif pengendalian intern maka semakin dapat dicegah terjadinya kecurangan perusahaan (Friskila Sumiati, 2010).

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), ada 3 bentuk kecurangan yang diistilahkan dengan *fraud tree*, yaitu *corruption* (korupsi), *Asset Misappropriation* (pengambilan aset secara ilegal), dan *Fraudulent Statemens* (pernyataan palsu atau salah pernyataan). Dari tiga bentuk kecurangan tersebut di atas maka pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi.

Menurut Simanjuntak (2008:122), dalam teori *GONE* terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu: *greed* (keserakahan), *oportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), *exsposure* (pengungkapan). *greed* dan *need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan *oportunity* dan *exsposure* berhubungan dengan organisasi sebagai korban pembuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum). Faktor individual berhubungan dengan prilaku yang melekat dari individu itu sendiri. Dalam kaitannya dengan faktor individu tersebut akan berkaitan dengan moral dan motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan.

Menurut Bertens (1993:7), moralitas berasal dari kata sifat latin "*moralis*" mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral. Moralitas suatu perbuatan/prilaku baik ataupun buruk. Berdasarkan teori *GONE* diatas, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang

disebabkan oleh moral yaitu *greed* (keserakahan). Menurutny semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Jadi kecurangan muncul dan datang karena perilaku buruk dari seseorang tersebut yaitu keserakahan yang ada dalam dirinya.

Sebuah study CFE (1996) dalam James A. Hall seorang individu dengan tingkat integritas tinggi dan tekanan (kebutuhan) serta kesempatan terbatas untuk melakukan *fraud* cenderung bersifat jujur, sebaliknya individu yang integritasnya kurang, ketika ditempatkan dalam situasi tekanan kebutuhan meningkat dan diberikan kesempatan melakukan *fraud* asalkan kebutuhannya terpenuhi. Dalam Amin Widjaja (1992:52) alasan yang melatarbelakangi kecurangan manajemen adalah menejer tidak mengindahkan moral (*Unscrupulous*) mungkin membantu kepentingan yang bertentangan. Dengan mengetahui sifat dan karakteristik manusia yang paling mungkin melakukan kecurangan, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi.

Menurut Cressey dalam Tuanakotta (2007:107), untuk meneliti para pegawai yang mencuri uang perusahaan (*embezzlers*) yang merupakan perbuatan kecurangan, ia mewawancarai 200 orang yang dipenjara karena *fraud*. Cressey menemukan bahwa adanya *violation of ascribed obligation*, artinya melanggar suatu pedoman kerja atau lebih dikenal juga dengan penyalahgunaan jabatan merupakan salah satu perbuatan kecurangan yang disebabkan oleh kurangnya moral seseorang.

Menurut survey KMPG dalam Koletar (2003:56), faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan adalah menyalahgunakan jabatan dan adanya kebiasaan berjudi yang berkaitan dengan buruknya moral seseorang. Jadi, moralitas disini berkaitan dengan perilaku keserakahan

(*greed*), penyalahgunaan jabatan (tidak berperilaku sesuai dengan pedomannya), dan kebiasaan berjudi seseorang yang akan mempengaruhi tingkat kecurangan.

Menurut PP No 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atau tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap praturan perundang-undangan. Menurut Tuanakotta (2007:100), dari bentuk kecurangan pengambilan aset secara ilegal (*Asset Misappropriation*) dalam bahasa sehari-hari disebut pencurian (*Larceny*) yaitu bentuk penjarahan yang dikenal sejak awal perbedaan manusia, dimana peluang untuk terjadi penjarahan jenis ini berkaitan erat lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*Safeguarding of Asset*).

Sedangkan menurut teori *GONE* diatas, faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi yaitu adanya *opportunity* (kesempatan). Kecurangan umumnya didorong oleh adanya kesempatan. Kesempatan tersebut muncul karena lemahnya pengawasan, seperti tidak adanya otoritas untuk setiap transaksi dalam pembelian, sehingga bagian pembelian bisa saja melakukan kecurangan dengan menggelapkan jumlah pembelian, atau melakukan pembelian yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Serta karena itu tidak adanya tindakan atau konsekuensi kepada pelaku kecurangan terutama dalam hal pengungkapan (*Exposure*) kecurangan yang telah terjadi, maka hal ini akan semakin mendorong seseorang untuk bisa melakukan kecurangan yang sama.

Pelaksanaan Pengendalian Intern yang cukup dan efektif dapat memperkecil celah para pelaku kecurangan untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan menguntungkan

mereka sendiri. Semakin efektif pengendalian intern maka semakin dapat dicegah terjadinya kecurangan perusahaan, dikutip dalam Murniati (2004).

Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yaitu Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman, dimana ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembuatan pabrik mini pekan ternak yang pada tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp.250.000.000. Dimana anggaran yang dialokasikan tersebut Rp.150.000.000 digunakan untuk pengadaan mesin dan gedung, dan Rp.100.000.000 untuk pengadaan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi seperti yang terlihat pada table 1 dibawah ini.

Tabel 1
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Kegiatan Pembuatan Pabrik Mini Pekan Ternak
Di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun Anggaran 2009

No	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	Fisik (%)	Anggaran Tidak Terealisasi (Rp)	Penyalah Gunaan Anggaran
1	Pembuatan pabrik mesin pecan ternak di kabupaten padang pariaman tahun anggaran 2009	250.000.000	150.000.000	60 %	100.000.000	100.000.000

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman.

Melihat kepada tabel diatas bahwa dari Rp.250.000.000 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembuatan pabrik mini peternakan, dimana hanya Rp.150.000.000 yang direalisasikan untuk pembelian peralatan dan mesin pabrik. Sedangkan sisanya Rp.100.000.000,

tidak direalisasikan. Dan ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa, dana yang ada sebesar Rp.100.000.000 disetorkan oleh bendaharawan kegiatan kedalam rekening pribadinya.

Pada pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa cleaning service pada kantor Badan Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2009 juga terdapat kecurangan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman. Terdapat kelebihan pembayaran atas jasa cleaning service yang tidak sesuai dengan kontrak, dimana hal ini bisa terjadi akibat dari kerja sama yang dilakukan antara aparat pelaksana dengan penyedia jasa cleaning service yang kurang baik.

Dimana pada saat itu jasa cleaning service yang dipekerjakan sebanyak 4 orang dengan nilai kontrak sebesar Rp.38.000.000. Tetapi akibat dari adanya kerja sama yang tidak sesuai aturan yang dilakukan aparat dengan penyedia jasa cleaning service, dimana pada tahun anggaran 2009 itu, jumlah cleaning service yang dipekerjakan hanya sejumlah 2 orang. Hal itu tidak sesuai dengan isi perjanjian kontrak yang dibuat. Akibat dari kecurangan tersebut, terdapat kerugian yang diderita oleh Negara sebesar Rp.19.000.000. Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan Kantor Inspektorat atas pemeriksaan ini, perusahaan penyedia jasa cleaning service harus mengembalikan kelebihan dana tersebut. Hal ini membuktikan masih rendahnya moralitas dan system pengendalian intern pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat tersebut.

Perlunya upaya perbaikan sistem pengendalian internal oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan berbagai penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli. Menurut Wilopo (2007), kecurangan dapat disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. Jika suatu pengendalian intern lemah maka akan mengakibatkan kekayaan atau aset suatu Negara yang dikelola pemerintah daerah tidak terjamin keamanannya, informasi yang ada tidak diteliti dan

tidak dapat dipercaya, tidak efisien, dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional serta tidak dapat dipatuhinya kebijakan kepala daerah dan perundang-undangan yang ditetapkan.

Hasil penelitian oleh Wilopo (2007), menemukan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi diperusahaan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi oleh manajemen perusahaan. Sedangkan kesesuaian kompensasi memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang sesuai pada perusahaan BUMN di Indonesia tidak secara signifikan menurunkan kecurangan akuntansi di manajemen perusahaan. Moralitas manajemen memberikan pengaruh yang signifikan negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moralitas manajemen pada perusahaan terbuka dan BUMN di Indonesia, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian merupakan replikasi dari penelitian Wilopo (2006) yang melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan BUMN di Indonesia”. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian Wilopo yaitu: keefektifan pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetri informasi, serta moralitas manajemen. Adapun perbedaan dari penelitian Wilopo adalah variabel yang digunakan yaitu moralitas dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah. Selain itu penelitian dilakukan pada instansi Pemerintahan Daerah Kab. Padang Pariaman, sedangkan Wilopo meneliti di Perusahaan Publik dan BUMN di Indonesia. Perbedaan ini bertujuan untuk melihat apakah moralitas dan sistem pengendalian

intern aparatur pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kecurangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengurangi tindakan kecurangan maka tindakan kecurangan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **:Pengaruh Moralitas dan Sistem Pengendalian Intern Aparatur Pemerintahan terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas , maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kecurangan dalam laporan keuangan?
2. Bagaimana mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan?
3. Bagaimana cara mengatasi kecurangan dalam laporan keuangan?
4. sejauhmana moralitas aparatur pemeintah berpengaruh terhadap kecurangan dalam laporan keuangan?
5. Sejauhmana sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kecurangan dalam laporan keuangan?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan seberapa besar moralitas, dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah mempengaruhi tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana pengaruh moralitas aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam Laporan Keuangan?
2. Sejauhmana pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap tingkat kecurangan dalam Laporan keuangan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Pengaruh moralitas aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan akuntansi dalam Laporan Keuangan.
2. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap tingkat kecurangan akuntansi dalam Laporan keuangan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademis, penelitian ini untuk mendalami dan memperluas pengetahuan tentang pengaruh moralitas, sistem pengendalian intern terhadap tingkat kecurangan dalam Laporan Keuangan.
2. Bagi Praktisi hukum, penelitian ini untuk menambah dan memberikan gambaran pengetahuan mengenai kecurangan dalam Laporan Keuangan. Sehingga tidak salah dalam melakukan tindakan pengambilan keputusan.

3. Bagi peneliti, dapat mengetahui dan menambah wawasan tentang tingkat kecurangan dalam Laporan Keuangan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti moralitas dan sistem pengendalian intern.
4. Bagi penelitian selanjutnya, dapat dijadikan referensi yang memadai dalam melakukan dan melanjutkan penelitian yang sejalan dan memperluas penelitian ini dengan menambah atau mengkombinasikan variabel-variabel penelitian untuk mencapai hasil yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Definisi Kecurangan

Menurut Arens (2008:430), kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam kaitannya dengan konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja.

Menurut Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) (2003:1) tindak kecurangan (*fraud*) dapat didefinisikan sebagai suatu salah saji dari suatu fakta yang bersifat material yang diketahui tidak benar atau dilakukan dengan sengaja, dengan maksud menipu terhadap pihak lain yang mengakibatkan pihak lain merugi.

Menurut Sawyer (2006:339) kecurangan (*fraud*) adalah melakukan kejahatan dengan menipu. Banyak istilah dari kecurangan, dapat disebut kecurangan (*fraud*), kejahatan kerah putih (*white color crime*) dan penggelapan (*embezzlement*).

- 1) Kecurangan adalah meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan tersebut dapat dilakukan untuk keuntungan ataupun kerugian organisasi dan oleh orang-orang diluar maupun di dalam organisasi.
- 2) Kejahatan kerah putih adalah tindakan yang dilakukan dengan cara nonfisik melalui penyembunyian/penipuan untuk mendapatkan uang/harta benda, untuk menghindari pembayaran, untuk mendapatkan keuntungan bisnis/pribadi.

3) Penggelapan adalah konversi secara tidak sah untuk kepentingan pribadi, harta benda yang secara sah berada di bawah pengawasan pelaku kejahatan. Penggelapan tidak meliputi tindakan-tindakan kriminal seperti penyuapan, pencurian, kecurangan terhadap pemerintah, memperoleh harta benda melalui ancaman kekerasan.

Menurut Tuanakota (2007:95) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud* seperti Pasal 378 tentang perbuatan curang: (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”).

Menurut Suhermadi (2006), mendefinisikan *fraud* sebagai suatu tindakan kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, *fraud* adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud penggelapan disini adalah merubah aset/kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar adalah untuk kepentingan dirinya. Dengan demikian perbuatan yang dilakukannya adalah untuk menyembunyikan, menutupi atau dengan cara tidak jujur lainnya melibatkan atau meniadakan suatu perbuatan atau membuat pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi di bidang keuangan atau keuntungan lainnya atau meniadakan suatu kewajiban bagi dirinya dan mengabaikan hak orang lain.

a. **Jenis-Jenis Kecurangan**

Menurut Tuanakotta (2007:96), *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) adalah salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam 3 kelompok sebagai berikut:

1) Korupsi (*corruption*)

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukan pengertian korupsi menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut ACFE korupsi terbagi dalam:

- a) Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yaitu pertentangan kepentingan terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif suatu organisasi atau perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak kurang baik terhadap organisasi atau perusahaan. Pertentangan kepentingan termasuk dalam 3 kategori yaitu rencana penjualan, rencana pembelian, dan rencana lainnya.
- b) Suap (*bribery*) adalah penawaran, pemberian, penerimaan/permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan dalam membuat keputusan bisnis
- c) Pemberian ilegal (*illegal gravity*) pemberian ilegal hampir sama dengan suap, tetapi pemberian ilegal ini bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, ini hanya sebuah permainan. Orang yang memiliki pengaruh akan diberi hadiah yang mahal atas pengaruh yang dia berikan dalam negoisasi/kesepakatan bisnis. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai.

d) Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*), pada dasarnya pemerasan secara ekonomi lawan dari suap (*bribery fraud*). Penjual menawarkan untuk memberi suap/hadiah pada pembeli yang memesan produk dari perusahaan.

2) Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*)

Penyalahgunaan aset/harta perusahaan atau organisasi adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset perusahaan atau organisasi untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam:

- a) Kecurangan kas (*cash fraud*), yang termasuk kecurangan kas adalah pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang seperti pemalsuan cek.
- b) Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*) adalah kecurangan berupa pencurian dan pemakaian untuk kepentingan pribadi terhadap persediaan atau aset lainnya.

3) Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*)

Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material dalam laporan keuangan yang dapat merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat dibagi dalam beberapa kategori:

- a) *Timing difference (improper treatment of sales)*: bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda / lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya, misalnya mencatat transaksi penjualan lebih awal dari transaksi yang sebenarnya.
- b) *Fictitious revenues*: bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (*fictive*)

- c) *Concealed liabilities and expenses*: bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan perusahaan terlihat bagus.
- d) *Improper disclosure*: perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan sehingga pembaca laporan keuangan tidak mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di perusahaan.
- e) *Improper asset valuation*: bentuk kecurangan laporan keuangan dengan melakukan penilaian yang wajar/ tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atas aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.

b. Faktor-faktor kecurangan

Menurut Singleton (2006), terdapat 3 faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang dikenal dengan sebutan “*fraud triangle*”, sebagai berikut:

1) *Pressure* (Tekanan)

Tekanan merupakan faktor pendorong pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Misalnya adanya tekanan karena dia memiliki utang atau tekanan untuk dapat memperbaiki posisinya di perusahaan. Karyawan perusahaan yang diharapkan dengan hilangnya penjualan, kompetisi yang kuat, schedule atau spesifikasi yang berat, peraturan-peraturan yang keras atau laba yang menurun, mungkin melakukan hal-hal yang ilegal atau tidak etis untuk membalik posisi mereka atau perusahaan.

2) *Opportunity* (Kesempatan)

Kecurangan dapat terjadi jika ada kesempatan untuk melakukan perusahaan. perusahaan yang tidak memiliki pengendalian intern yang efektif, kesempatan untuk melakukan kecurangan terbuka lebar. Tapi dengan pengendalian intern yang memadai akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan atau godaan para pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Misalnya, jika aktiva dibiarkan tanpa pengawas, karyawan dapat beralasan bahwa kondisi memang memungkinkan untuk melakukan kecurangan terhadap aktiva.

3) *Rationalization*

Para pelaku kecurangan menganggap bahwa kecurangan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar sehingga mereka beranggapan bahwa mereka hanya mengambil sedikit atau meminjam harta perusahaan dan tidak akan merugikan perusahaan.

Menurut Simanjuntak (2008:122), dalam *GONE theory* menyebutkan bahwa kecurangan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1) *Greed* (keserakahan)

Menurutnya semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Jadi kecurangan muncul karena keserakahan dalam diri seseorang.

2) *Opportunity* (Kesempatan)

Setiap orang yang berada dalam organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan untuk melakukan kecurangan. Kecurangan umumnya didorong oleh adanya

kesempatan, karena tanpa adanya kesempatan kecurangan tidak bisa terjadi. Kesempatan tersebut muncul antara lain disebabkan oleh lemahnya pengawasan dalam perusahaan, seperti tidak adanya otorisasi untuk setiap transaksi dalam pembelian, sehingga bagian pembelian bisa saja melakukan kecurangan dengan mengelapkan jumlah pembelian, atau melakukan pembelian yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

3) *Need* (Kebutuhan)

Setiap orang punya kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang akan melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi walau dengan melakukan kecurangan. Karena adanya kebutuhan dan kesempatan maka kecurangan dapat terjadi.

4) *Exposure* (Pengungkapan)

Karena tidak adanya tindakan atau konsekuensi kepada pelaku kecurangan terutama dalam hal pengungkapan kecurangan yang telah terjadi, maka hal ini akan semakin mendorong seseorang untuk bisa melakukan kecurangan yang sama.

Menurut Tuanakotta (2007:159), ada ungkapan yang secara mudah menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari *fraud*. Ungkapan itu adalah: *fraud by need, by greed, and by opportunity*. Namun ada makna dari ungkapan itu. Kalau ingin mencengah *fraud*, hilangkan atau tekan sedapat mungkin penyebab. Menghilangkan atau menekan *need* dan *greed* yang mengawali terjadinya *fraud* dilakukan sejak menerima seseorang (*recruitment process*). Sedangkan unsur *by opportunity* dalam ungkapan tersebut biasanya ditekan melalui pengendalian intern.

Menurut Koletar (2003:56), *KPMG in their 1998 Fraud Survey, is reported to have concluded that the following factor seem to be causes or indicators of employee fraud:*

- a. *Personal financial pressure*
- b. *Substance abuse*
- c. *Gamling*
- d. *Real or imagined grievances*
- e. *Ongoing transactions with related parties*
- f. *Increased stress*
- g. *Internal pressure o meet deadlines or budgets*
- h. *Short vacation*
- i. *Unusual hours*

Menurut survei oleh KPMG pada tahun 1998 tentang kecurangan, faktor penyebab atau indikator kecurangan yang dilakukan oleh pimpinan maupun bawahan dapat disebabkan karena:

- 1) Tekanan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Adanya penyalahgunaan jabatan
- 3) Kebiasaan berjudi
- 4) Membayangkan hidup mewah
- 5) Kejadian selalu berulang-ulang
- 6) Stress yang berlebihan karena tuntutan hidup
- 7) Tekanan dalam memenuhi batas waktu anggaran
- 8) Hari berlibur yang pendek
- 9) Jam kerja yang tidak biasa

Faktor-faktor di atas tidak terlepas dari moral dan motivasi dari seseorang sehingga dia melakukan kecurangan. Moralitas yaitu suatu perbuatan/prilaku baik ataupun buruk. Dari 9 faktor penyebab kecurangan yang disurvei oleh KPMG yang menjadi penyebab kecurangan yang terkait dengan moral seseorang yaitu menyalahgunakan jabatan, kebiasaan berjudi.

Sedangkan motivasi artinya sebab, alasan dasar, pikiran dasar, dorongan bagi seseorang untuk berbuat, atau ide pokok yang selalu berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia. Dari 9 faktor penyebab kecurangan yang disurvei oleh KPMG yang menjadi penyebab kecurangan yang terkait dengan motivasi yaitu adanya tekanan dalam diri seseorang untuk memenuhi keuangannya, selalu membayangkan hidup mewah.

Selain dari faktor-faktor di atas, Tuanakotta (2007:100), dari bentuk kecurangan “pengambilan” aset secara ilegal (*Asset misappropriation*) dalam bahasa sehari-hari disebut pencurian (*Larceny*) yaitu bentuk penjarahan yang paling kuno dan dikenal sejak awal peradaban manusia, dimana peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*Safeguarding of asset*)

c. Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2001) dalam Wilopo (2006), menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengetahui pemakai Laporan Keuangan, salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berkaitan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut William (1996:67), kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) terdiri dari tindakan-tindakan seperti:

- 1) Manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan Laporan Keuangan.

- 2) Representasi yang salah atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam Laporan Keuangan.
- 3) Salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa kecurangan dalam Laporan Keuangan terdiri dari tindakan manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi, penghapusan secara sengaja terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan, dan terdapatnya salah penerapan secara sengaja terhadap prinsip-prinsip akuntansi.

Menurut Taylor (1997:135), memberikan defnisi dari kecurangan pelaporan keuangan yaitu kegiatan yang disengaja atau nekat, apakah berupa kegiatan atau penghapusan yang menghasilkan kesalahan pernyataan keuangan sehingga terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Menurut Schilit (1993:191), mengidentifikasi tujuh kategori besar istilah lain kecurangan pelaporan keuangan antara lain merekam penghasilan sebelum didapatkan, membuat pendapatan fiktif, membesar-besarkan keuntungan dengan transaksi yang tidak terjadi, mengganti pengeluaran saat ini dengan periode sebelumnya, tidak merekam atau menyingkap kebenaran, mengganti pendapatan terbaru dengan periode sebelumnya, mengganti pengeluaran masa yang akan datang dengan periode sebelumnya.

2. Moralitas

a. Definisi Moralitas

Menurut Bertens (1993:7), moralitas (dari kata sifat latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Kita berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik tau buruk.

Menurut Salam (2002:2), moral berasal dari kata latin *Mores*. *Mores* berasal dari kata *mos* yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Berarti moral dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan, yang memuat ajaran tentang baik buruknya perbuatan. Jadi, perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Penilaian itu menyangkut perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Menurut Budiningsih (2004:24), moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya bukan karena ia mencari keuntungan. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.

Menurut Amrizal (2004), peranan moral/kepribadian yang baik dari seorang pimpinan dan komitmennya yang kuat sangat mendorong tegaknya suatu etika perilaku dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan dasar bertindak dan suri tauladan bagi seluruh pegawai. Pimpinan tidak bisa menginginkan sutu etika dan perilaku yang tinggi dari suatu organisasi sementara pimpinan itu sendiri tidak sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Dalam suatu organisasi, terutama untiorganisasi yang besar dari manajemen sangat dibutuhkan dua hal yaitu komitmen moral dan keterbukaan dalam komunikasi.

Menurut Amrizal (2004), dalam suatu organisasi perbuatan curang dapat terjadi karena kurangnya kepedulian positif karyawan terhadap perbuatan salah tersebut bahkan

dipandang sudah hal yang biasa atau pura-pura tidak mengetahuinya. Kepedulian positif dari lingkungan kerja sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang kuat. Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral akan menyuburkan tindakan kecurangan yang pada akhirnya akan merusak bahkan dapat menghancurkan organisasi.

Menurut Cressey dalam Tuanakotta (2007:107), untuk meneliti para pegawai yang mencuri uang perusahaan (*embezzlers*) yang merupakan perbuatan kecurangan, ia mewawancarai 200 orang yang dipenjara karena *fraud*. Cressey menemukan bahwa adanya *violation of ascribed obligation*, artinya melanggar suatu pedoman kerja atau lebih dikenal juga dengan menyalahgunaan jabatan merupakan salah satu perbuatan kecurangan yang disebabkan oleh kurangnya moral seseorang.

Sedangkan menurut Simanjuntak (2008:122), dalam *GONE theory* menyebutkan bahwa kecurangan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu *greed* (Keserakahan). Keserakahan berhubungan dengan moral seseorang. Menurut semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Jadi kecurangan muncul karena keserakahan dalam diri seseorang.

Menurut survey KMPG dalam Koletar (2003:56), faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan adalah menyalahgunakan jabatan dan adanya kebiasaan berjudi yang berkaitan dengan buruknya moral seseorang. Jadi, moralitas disini berkaitan dengan perilaku keserakahan (*greed*), penyalahgunaan jabatan (tidak berperilaku sesuai dengan pedomannya), dan kebiasaan berjudi seseorang yang akan mempengaruhi tingkat kecurangan.

b. Jenis –jenis Moral

Tarumingkeng (2001) dalam arie angraini (2008) merangkum beberapa jenis moral yang dipetik dari berbagai sumber di Internet (Tinjauan Ensiklopedia Filsafat) antara lain:

- 1) Moral *realism*, moral berdasarkan kondisi yang nyata/realitas
- 2) Moral *luck*, moral yang dipengaruhi oleh keberuntungan.
- 3) Moral *relativitism*, moral yang bersifat relative.
- 4) Moral *rational*, moral berdasarkan penggunaan akal sehat atau prosedur nasional.
- 5) Moral *scepticim*, moral yang menunjukkan sikap ragu-ragun karena tidak memberikan nilai berdasarkan pengetahuan.
- 6) Moral *personhood*, moral yang ditentukan berdasarkan kesadaran, perasaandan tindakan pribadi atau merupakan bagian dari moral masyarakat. Moral masyarakat ,menyangkut semua yang memerlukan pertimbangan moral dalam hak-hak dan kewajiban.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian intern :

1. Menjaga kekayaan organisasi.

2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dilihat dari tujuan tersebut maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu Pengendalian Intern Akuntansi (Preventive Controls) dan Pengendalian Intern Administratif (Feedback Controls).

Pengendalian Intern Akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh : adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

Pengendalian Administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.(dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi) Contoh : pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari defenisi tersebut maka secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan dari Sistem Pengendalian Intern adalah: (1), menjamin tercapainya tujuan organisasi/perusahaan; (2), dapat dipercayanya laporan keuangan yang disusun

organisasi/perusahaan; dan (3), dipatuhinya semua peraturan per-UU-an yang berlaku. Secara khusus, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan kecurangan-kecurangan tidak hanya mengedepankan cara represif. Pemerintah juga menempuh tindakan preventif dengan membangun Sistem Pengendalian Intern dan memberdayakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai ikhtiar dalam mencegah tindak KKN. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mewujudkan kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern, membutuhkan peran pimpinan instansi pemerintah.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 PP No. 60 Tahun 2008 diamanahkan agar pimpinan instansi pemerintah menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Proses penciptaan lingkungan pengendalian antara lain melalui penegakan integritas dan nilai etika serta komitmen terhadap kompetensi dengan menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia dalam wujud aturan perilaku, memberikan keteladanan, menegakkan disiplin dan sebagainya. Penciptaan lingkungan pengendalian yang kondusif dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi implementasi unsur-unsur pengendalian intern lainnya.

Dalam PP No 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian intern menurut Bastian (2003:9), merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas dan segenap personil) yang mendesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan sebagai berikut:

- a. Keandalan Laporan Keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi

Amrizal (2004), menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencegah timbulnya kecurangan adalah dengan merancang sebuah sistem yang dilengkapi dengan intern control yang cukup memadai sehingga kecurangan sukar dilakukan oleh pihak luar maupun orang dalam perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan terhindar dari kecurangan sehingga Laporan Keuangan yang disajikan oleh perusahaan tentunya akan lebih akurat dan lebih menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga tidak menyesatkan para penggunanya dalam pengambilan keputusan.

Menurut Koleter (2003:103), *control are, in many ways, the bedrock infrastructure of the organization's defensive system against fraud and other types of business risk. They have been described in this role as follows: Internal controls are the first line of defense against fraud within any organization, a comprehensive, fully implemented, and regularly monitored system of controls is essential to the prevention and detection of losses that arise from fraud. Internal auditors who understand the various types of fraud and their relative rates of occurrence will be more likely to recognize any red flags and be better prepared to fight the high organizational cost of corruption.*

Salah satu cara untuk mengontrol kecurangan maupun kerugian dalam bisnis, adalah dengan membangun suatu sistem pengendalian intern. Tujuan dari pengendalian

intern tersebut adalah sebagai pertahanan pertama untuk melawan kecurangan dalam organisasi. Hal ini perlu diterapkan untuk memonitor sistem kendali untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Pengendalian intern memahami berbagai jenis kecurangan yang akan dilakukan oleh organisasi, dan juga untuk mendeteksi terjainya korupsi.

Menurut Amrizal (2004) cara yang digunakan manajemen dalam mengefektifkan aktivitas pengendalian intern:

a. Mereview kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersaa dengan analisis satu hubungan penyelidikan dan perbaikan keuangan.

b. Pengolahan informasi

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer* dan lingkungan pemakai akhir. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

c. Pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindung dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan data file, dan perhitungan secara periodik dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

d. Pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidak beresan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

Menurut Wilopo (2006), jika suatu sistem pengendalian intern lemah maka akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak diteliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta tidak dapat dipatuhinya kebijakan manajemen yang ditetapkan. Dengan adanya pengendalian wewenang oleh pemilik kepada pengelola, maka fungsi pengendalian semakin bertambah penting. Hal ini untuk menentukan apakah fungsi dan wewenang yang didelegasikan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Proses pengendalian intern tersebut dilakukan oleh pihak manajemen yang bertanggungjawab untuk melindungi dan mengamankan harta perusahaan.

Menurut Tuanakotta (2007:100), dari bentuk kecurangan pengambilan aset secara ilegal (*Asset misappropriation*) dalam bahasa sehari-hari disebut pencurian (*Larceny*), yaitu bentuk penjarahan yang dikenal sejak awal peradaban manusia, dimana peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian

intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of assets*). Menurut Koletar (2003:56), menyebutkan bahwa faktor penyebab kecurangan yang di survey oleh KPMG kejadiannya selalu berulang-ulang.

Menurut Simanjutak (2008:122), dalam teori *GONE* faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi yaitu adanya *Opportunity* (Kesempatan). Kecurangan umumnya didorong oleh adanya kesempatan. Kesempatan tersebut muncul karena lemahnya pengawasan, seperti tidak adanya otorisasi untuk setiap transaksi dalam pembelian, sehingga bagian pembelian bisa saja melakukan kecurangan dengan menggelapkan jumlah pembelian, atau melakukan pembelian yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Serta karena tidak adanya tindakan atau konsekuensi kepada pelaku kecurangan terutama dalam hal pengungkapan kecurangan yang tela terjadi, maka hal ini akan semakin mendorong seseorang untuk bisa melakukan kecurangan yang sama.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain penelitian Wilopo (2006), mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi: studi pada perusahaan publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di perusahaan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian internal di perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi oleh manajemen perusahaan. Sedangkan moralitas manajemen memberikan pengaruh yang signifikan negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin tinggi moralitas manajemen semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi atau semakin tinggi tahapan moralitas

manajemen semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari pada kepentingan perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadi.

Lebih lanjut, hasil penelitian Aviora (2005), yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Sumatera Barat, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian intern pada perusahaan maka akan mengurangi kecurangan pelaporan keuangan. Karena dengan efektifnya pengendalian intern dapat mendorong pihak manajemen perusahaan untuk tidak melakukan kecurangan pada pelaporan keuangan.

Sedangkan moralitas manajemen berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini berarti bahwa moralitas manajemen berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi di perusahaan. Moralitas yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang manajer mampu untuk menghindari manajer melakukan kecurangan pelaporan keuangan, karena seorang manajer bertindak untuk lebih mementingkan kepentingan perusahaan dibandingkan dengan kepentingan sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh secara signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.

Nani (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh system pengendalian intern, moralitas dan motivasi terhadap tingkat kecurangan ndalam pelaporan keuangan pada SKPD di kota Padang, memperoleh hasil system pengendalian intern berpengaruh signifikan

negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pada SKPD di kota Padang, moralitas berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pada SKPD dikota Padang.

C. Hubungan Antar Variabel Penelitian

1. Moralitas terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Menurut Bertens (1993:7), moralitas berasal dari kata sifat latin “moralis” mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Moralitas yaitu suatu perbuatan/prilaku baik ataupun buruk. Berdasarkan penelitian Wilopo (2006), moralitas manajemen memberikan pengaruh yang signifikan negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin tinggi moralitas manajemen semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi atau semakin tinggi tahapan moralitas manajemen semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari pada kepentingan perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadi.

Menurut Simanjuntak (2008:122), dalam teori *GONE*, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *Greed* (keserakahan). Keserakahan merupakan bentuk moral seseorang yang jelek. Semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Jadi kecurangan muncul karena keserakahan dalam diri seseorang.

Selain itu, menurut Koetar (2003:56), penyalahgunaan jabatan merupakan prilaku/moral yang tidak sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan adanya kebiasaan berjudi merupakan faktor yang

mempengaruhi tingkat kecurangan seseorang, dimana faktor ini secara langsung berkaitan dengan moral (perbuatan).

2. Sistem Pengendalian Intern terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern menurut Bastian (2003:9), merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas dan segenap personil) yang mendesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tiga tujuan pencapaian sebagai berikut:

- a. Keandalan Laporan Keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektifitas dan efisiensi operasi

Berdasarkan penelitian Wilopo (2006), mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi: studi pada perusahaan publik dan badan usaha milik negara di Indonesia hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian intern yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di perusahaan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian intern di perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi.

Menurut Tuanakotta (2007:100), dari bentuk kecurangan pengambilan aset secara ilegal (*Asset misappropriation*) dalam bahasa sehari-hari disebut pencurian (*Larceny*), yaitu bentuk penjarahan yang dikenal sejak awal peradaban manusia, dimana peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian

intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of assets*). Menurut Koletar (2003:56), menyebutkan bahwa faktor penyebab kecurangan yang di survey oleh KPMG kejadiannya selalu berulang-ulang.

Menurut Simanjutak (2008:122), dalam teori *GONE* faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi yaitu adanya *Opportunity* (Kesempatan). Kecurangan umumnya didorong oleh adanya kesempatan. Kesempatan tersebut muncul karena lemahnya pengawasan, seperti tidak adanya otorisasi untuk setiap transaksi dalam pembelian, sehingga bagian pembelian bisa saja melakukan kecurangan dengan menggelapkan jumlah pembelian, atau melakukan pembelian yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Serta karena tidak adanya tindakan atau konsekuensi kepada pelaku kecurangan terutama dalam hal pengungkapan kecurangan yang telah terjadi, maka hal ini akan semakin mendorong seseorang untuk bisa melakukan kecurangan yang sama.

D. Kerangka Konseptual

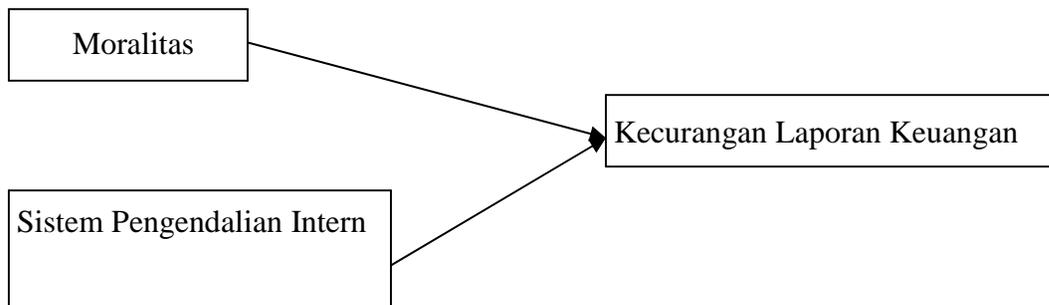
Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dari kajian teori yang telah dikemukakan di atas. Dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh moralitas, sistem pengendalian intern aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam Laporan keuangan pemerintah kota Pariaman.

Moralitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Dengan menyalahgunakan jabatan yang telah diberikan (tidak berperilaku sesuai dengan pedomannya) dan keserakahan (*greed*) merupakan faktor pemicu kecurangan

(*fraud*). Seseorang melakukan kecurangan di timbulkan karena adanya tekanan (*preasure*) dalam diri seseorang (memiliki utang) dan adanya kebutuhan (*need*).

Lemahnya sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi kecurangan dalam laporan keuangan. Jika suatu sistem pengendalian intern lemah maka akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak diteliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta tidak dapat dipenuhinya kebijaksanaan pimpinan yang ditetapkan. Dengan adanya pengendalian wewenang oleh pimpinan kepada pegawainya, maka fungsi pengendalian semakin bertambah penting. Hal ini untuk menentukan apakah tugas dan wewenang yang didelegasikan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Bertolak pada kajian di atas, maka untuk lebih jelasnya variabel-variabel yang menjadi objek pengujian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



E. Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas dan didukung kajian teori, maka dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Moralitas aparatur pemerintahan berpengaruh negatif terhadap kecurangan dalam Laporan Keuangan.

H2: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif terhadap kecurangan dalam Laporan Keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai pengaruh Moralitas dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Moralitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan negative terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sistem pengendalian intern aparatur pemerintah berpengaruh signifikan negative terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih ada terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 13.7% . Sedangkan 86.3% dijelaskan oleh factor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruh dari kecurangan dalam laporan keuangan.

2. Penelitian ini merupakan metode survey menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam pengumpulan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil peneitian ini terlihat bahwa moralitas yang baik/bagus dari aparatur pemerintah perlu di tingkatkan, sedangkan motivasi negative dari aparatur pemerintah untuk melakukan kecurangan perlu dikurangkan dan sistem pengendalian intern dalam instansi perlu dikuatkan agar tingkat kecurangan bisa diminimalkan. Untuk mencegah kecurangan terjadi di instansi, sebaiknya dimulai sejak menerima seseorang (*recruitment process*) yang dilakukan melalui seleksi yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehingga pegawai yang diangkat/diambil benar-benar yang berkompeten di bidangnya.
2. Penelitian ini masih terbatas pada moralitas dan system pengendalian intern aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah variabel penelitian seperti kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi dan variabel-variabel lainnya yang mungkin berpengaruh kuat dengan kecurangan dalam laporan keuangan.

3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu dimana kepala SKPD belum sepenuhnya mengerti tentang pentingnya pengendalian intern untuk menurunkan tingkat kecurangan, namun jawaban dari kepala SKPD telah mampu menerapkan pengendalian intern. Jadi dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yaitu ada beberapa responden yang mengisi kuesioner penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, maka untuk penelitian selanjutnya selain menggunakan kuesioner dilakukan interview/bertanya langsung ke responden secara tegas dan jelas untuk mendapatkan data/informasi yang benar dan dengan pemaparan kasus pada kuesioner moralitas responden bias memahami pernyataan negative dan pertanyaan negative lainnya pada kuesioner kecurangan, sehingga kemungkinan responden menjawab tidak tepat. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih banyak memaparkan pernyataan positif.